UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB III

TINJAUAN PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat PT.PLN (persero)

Dalam perjalannya perusahaan listrik di Indonesia telah mengalami perubahan dan status keperusahaanya. Pada bab ini akan diuraikan tahapan perkembangan listrik sampai masa sekarang.

3.1.1 Fase Pemerintahan Belanda Tahun1905

Bandung Electrocit Maatsapijj atau disingkat dengan nama BEM didirikan dengan tugas untuk membuat atau membuat jaringan listrik dikota Bandung pada tahun 1913. Sedangkan *Land Water Kreat Bedonji* atau disingkat menjadi WB bertugas dibidang pengusaha pembangkit sddan penyalur tenaga listrik yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Indonesia pada tahun 1919. Menurut akte pendirian perusahaan listrik nomor 213 pada tanggal 31 desember 1919 dihadapan Notaris Andrian Hendrik Van Opsshulsen, dimana BEM dihapuskan dan digabung menjadi "GEBEO" Bandung, Kemudian setelah pendirian Akte Notaris tersebut dibuat maka pada tahun 1912 GEBEO V berdiri tepatnya pada tanggal 1 januari 1912.

3.1.1 Fase Pemerintahan Jepang Tahun 1942-1945

Pada masa pemerintahan Jepang perusahaan listrik ini diusahakan oleh Djawa "DENKI JOGYO SHA BANDUNG SI SHA". Sedangkan untuk

pembangkitan dan penyaluran dilakukan oleh dua instansi yaitu periode tahun 1942 oleh Denki Djogyo pada tahun 1943 sampai tahun 1945 oleh Denki Kosha.

3.1.3 Fase Pemerintahan Indonesia (kemerdekaan)

Pada masa revolusi perjuangan fisik, perindustrian dinegara Indonesia khusunya Jawa Barat dilaksanakan oleh Djawatan Politik. Pada tahun 1948 pemerintah belanda masuk keindonesia pindah ke Yogyakarta. Sedangkan pengusaha dan pendistribusian tenaga listrik khususnya di Jawa Barat termasuk Jakarta dilaksanakan oleh GEBEO kembali, pembangkitan dan penyebaran tetap dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu tepatnya pemerintah atau perusahaan negara pembangkit tenaga listrik yang diangkat menjadi "PENUSPETEL".

Pada tahun 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan milik asing maka dengan adanya nasionalisasi tersebut GEBEO diambil alih pada tanggal 27 desember 1957.

Sehubungan dengan nasionalisasi ini, maka pada tahun 1958 dikeluarkan undang-undang pemerintah No.19 tahun 1958, PP No.18 tahun 1959,PP pengganti undang-undang No.19 tahun1960 tentang perusahaan negara. Maka berdasarkan PP No.19 tahun 1959 tersebut GEBEO di Bandung dinyatakan sebagai perusahaan milik negara.

Berdarakan PP No.67 dibentuk badan pimpinan umum Perusahaan Umum Milik Negara yang disingkat BPU PLN. Tetapi berdasarkan pp No. 19 tahun 1965 dan peraturan mentri pekerjaan umum perusahaan umum dan tenaga kerja No.1/DPRT/1965 tanggal 21 januari 1965 diadakan reorganisasi, dimana BPU

PLN dihapuskan untuk dibentuk organisasi PLN yang disebut Perusahaan Umum Listrik Negara Eksploitasi dan dijawa barat disebut dengan eksploitasi XI yang berkedudukan di Bandung termasuk dengan cabang-cabangnya.

UNIKOM

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 dari peraturan pemerintah No.19 tahun 1965 yaitu peraturan pemerintah No. 11 tahun 1969 maka status PLN menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 2 undang –undang No. 9 tahun 1969 dengan nama Listrik Negara, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut perusahaan yang melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.125, dikatakan bahwa PLN adalah suatu perusahaan yang termasuk kedalam instansi perusahaan vital, dan menurut peraturan pemerintah No.18 tahun 1972 dikatakan bahwa tujuan dari Perusahaan Umum Listrik Negara adalah mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.

Kemudian berdasarkan pengumuman no. 15.D.III/1975, maka Perusahaan Umum Listrik Negara Eksploitasi XI berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Distribusi III yang disingkat PLN Distribusi III dan dirubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Cimahi.

Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Cimahi sejak tanggal 10 maret 1989 menempati bangunan untuk dijadikan kantor yaitu dijalan raya Tagog No.511 Cimahi. Perpindahan kantor dilakukan semata-mata karena kantor lama sudah tidak lagi digunakan karena sudah tidak ada lagi keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan jumlah ruangan kantor tersebut.

Pada tahun 1994, yaitu per 1 agustus 1994 terjadi perubahan dari perusahaan umum menjadi PT.PLN (Persero). Hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah No. 23 tentang PLN menjadi perseroan. Maka segala hak dan kewajiban, serta kekayaan pegawai PLN yang saat pembubaranya ini dapat diharapkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

3.1.3 Perkembangan PT.PLN (PERSERO)

Penyelenggaraan fasilitas kelistrikan di Indonesia umumnyadikelola oleh PT.PLN, nilai dari pembangkit sampai "END USER" menggunakan jaringan tegangan tinggi, menengah, gardu-gardu induk dan gardu distribusi sampai ke konsumen, pabrik-pabrik dan perusahaan banyak yang menyediakan pembangkit sendiri, terutama ilokasi yang belum terjangkau jaringan PLN.

Krisis Ekonomi yang melanda negeri kita telah membawa dampak diberbagai bidang dan sector.

Krisis yang berkepanjangan mencapai puncaknya pada tahun1995, dimana hal tersebut merupakan titik awal / permulaan timbulnya krisis keuangan ditubuh PLN.

Pembelian energi listrik dengnan pihak swasta yang perhitunganya memakai Dollar menjadi sesuatu yang membuat lebih terpuruknya bisnis kelistrikan PT.PLN dan mengalami kerugian.

Kerugian-kerugian sebagai akibat tidak sebandingnya lagi antara nilai membeli energi dan nilai jual yang dilakukan oleh PLN sebagai badan usaha yang dituntut menjadi perusahaan yang berorientasi bisnis juga sebagai perusahaan yang masih harus memikul misi sosial.

Keberadaan PLN harus tetap exist untuk tetap bisa bertahan dan sanggup menyediakan kenutuhan energi bagi masyarakat. Maka untuk itu sumber-sumber yang masih tersedia harus dapat dipergunakan dan didalam pengelolaanya dilakukan secara lebih selektif.

Struktur keorganisasian PLN secara umum perlu ditinjau ulang dan perlu diperbaiki. Perwujudan keatas tersebut PT.PLN (persero) lebih efektif dan efisien dalam hal menggunakan dengan tujuan akhir dapat memberikan keuntungan melalui penitik beratan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

Restrukturisasi yang dijadikan sasaran antara masing-masing unit diberikan keleluasaan didalam pelaksanaanya dengan sumber / resource dapat terkelola lebih baik.

Distribusi Jawa Barat sebagai salah satu unit dilingkungan PLN dalam melaksanakan restruktuisasi tersebut, membentuk unit-unit pelayanan. Unit-unit yang pelayanan yang bergerak keatas pelayanan secara kontak langsung dengan pelanggan disebut dengan Unit Pelayanan Pelanggan (UPP), dan unit yang memberikaqn support terhadap UPP disebut dengan Unit Tenik atau Unit Pelayanan Jaringan (UPJ).

UPP / UPJ yang dibentuk dan dillihat dari berbagai segi dan kondisi kearah yang dapat memberi keuntungan bagi PT.PLN (persero).

Unit Pelayanan Pelanggan terbentuk ada yang berasal dari ranting yang statusnya ditingkat, atau ada pula yang berasal dari ranting yang dinaikan statusnya sejenis halnya. Unit pelayanan pelanggan padalarang diresmikan bulan juli 2001, oleh pimpinan PT.PLN (persero) distribusi jawa barat dengan surat

keputusan No.080.K/021/PD,III/2000, yang pada awal namanya Unit Pelayanan Pelanggan adalah Cabang Pembantu (CAPEM).

Pada tanggal 1 januari 2001 dengan surat keputusan No.146.K/021/PDL,III/2000. dirubah menjadi Unit Pelayanan Pelanggan. Namun berubah tahun terakhir, karena keterbatasan dana disatu sisi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat disatu sisi lainya. Kebijakan ini seiringnya dengan pola perkembangan global diseluruh dunia. Dengan keluarnya peraturan pemerintah No.23 tahun 1994, tanggal 16 juni.

Maka PLN yang semula berbentuk PERUM (Perusahaan Umum) berubah bentuknya menjadi PT. (Perseroan Terbatas) dengan nama PT. Perusahaan Listrik Negara yang disingkat menjadi PT.PLN (persero) yang bertujuan :

1.Mengusahakan penyediaan tenaga lisrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
   a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
   b. Meningkatkan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2.Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
3.Menyelenggarakan usah-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundanganyang berlaku.

Pada saat perusahaan listrik negara berbentuk PERUM yang bertanggung jawab terhadap perkembangan perusahaan listrik negara adalah pemerintah. Juga

mngenai untung dan rugi yang ditangani oleh pemerintah. Lain halnya pada saat Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi perusahaan perseroan terbatas

(PT), maka modal dikelola oleh perusahaan Listrik itu sendiri sehingga untung ruginya pun ditangani oleh PLN.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.2 Bidang Kegiatan.

Bidang kegiatan yang ada di PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten UP.Padalarang yang berhubungan dengan informasi penyambungantenaga listrik baru

Informasi tentang tata cara penyambungan tenaga listrik meliputi :

1. Pelayanan penyambungan tenaga listrik baru system paket dan system bukan paket.
2. Pelayanan perubahan daya yang meliputi penambahan daya, penurunan daya dan penyesuaian daya.
3. Pelayanan penyambungan sementara.
4. Pelayanan perubahan golongan tarif atas permintaan pelanggan dan bukan pelanggan.
5. Pelayanan ganti nama pelanggan dan balik nama pelanggan.
6. Pelayanan pembetulan alamat pelanggan.
7. Pelayanan pengaduan pelanggan.
8. Pelayanan pembayaran tagihan susulan dan tagihan ganti rugi instalasi milik PLN yang hilang / rusak.
9. Pelayanan pembayaran rekening listrik dan tagihan lainya.

3.2 Visi, Misi dan Moto Perusahaan.

Visi di perusahaan PT.PLN (persero) yaitu :"*diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani*".

Misi perusashaan di PT.PLN (persero) yaitu :

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasaan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan usaha yang berwawasan lingkungan.

Adapun motto di PT.PLN (persero) yaitu : "LISTRIK UNTUK KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK (*Electricity for a better life*)".